

**REVITALISASI PANCASILA  
(MENCARI MODEL IMPLEMENTASI PANCASILA  
DI KABUPATEN MADIUN)\***

**Budiyono, Wawan Kokotiasa \*\***

**Abstrak**

**P**ancasila sebagai jati diri dan kepribadian bangsa mengalami degradasi yang luar biasa. Masyarakat kerap lalai tentang eksistensi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Baru bila terjadi gejala disintegrasi bangsa Pancasila dilihat sebagai rujukan untuk mengatasi problematika kebangsaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana masyarakat memahami pentingnya Pancasila sebagai dasar negara dan jati diri bangsa dan untuk menemukan pola yang tepat dalam mengimplementasikan Pancasila pada era demokrasi dan globalisasi.

Penelitian yang kami lakukan adalah tergolong penelitian deskriptif kualitatif. Menggali informasi yang mendalam tentang revitalisasi Pancasila di tengah-tengah masyarakat sekaligus mencari model implementasi nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat di Kabupaten Madiun relevan dengan tipe penelitian ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan berkaitan dengan revitalisasi Pancasila, mayoritas mengatakan bahwa Pancasila sebagai dasar negara wajib untuk direvitalisasi. Argumentasi dominan menyatakan karena Pancasila merupakan pedoman dan pondasi utama dalam menata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pola revitalisasi yang konstruktif adalah dengan menggiatkan kembali implementasi nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat. Yang notabene merupakan tanggung jawab bersama segenap komponen bangsa terutama para pemimpin bangsa, pemerintah dan institusi pendidikan serta lingkungan keluarga. Model implementasi nilai-nilai Pancasila yang paling efektif di tengah-tengah masyarakat adalah dengan cara melakukan sosialisasi melalui media massa terutama televisi. Karena itu komitmen dan keberpihakan media masa dalam merevitalisasi dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila memegang peranan yang penting dan menentukan dalam konteks kekinian (spirit reformasi).

Mekanisme sosialisasi secara terstruktur, sistematis dan massif merupakan model yang baik dan relevan untuk menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila di masyarakat. Polanya harus mengedepankan kesadaran dan partisipasi masyarakat ketimbang paksaan atau indoktrinasi.

**Kata kunci : Revitalisasi Pancasila**

---

*\*Hasil penelitian dosen pemula yang didanai oleh  
LPPM IKIP PGRI Madiun Tahun 2013*

*\*\*Dosen Prodi PPKn IKIP PGRI Madiun*

## PENDAHULUAN

Pancasila sebagai jati diri dan kepribadian bangsa mengalami degradasi yang luar biasa. Seringkali kita mendengar bahwa masyarakat yang telah lalai tentang eksistensi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Disisi lain itu fungsi dan peran Pancasila yang vital dalam kehidupan berbangsa dan bernegara banyak yang tidak dimengerti oleh warga negara kita. Seperti Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa, ideology bangsa, kepribadian bangsa, sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia, identitas nasional, karakter, pemersatu bangsa dan lain-lain. Yang lebih ironis, sebagian masyarakat ada yang tidak lagi hafal menyebut bunyi-bunyi sila dalam Pancasila secara baik dan benar. Sering meletupnya tragedi kekerasan antar kelompok beragama menandakan bahwa Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia sudah tidak lagi dihargai keberadaannya. Alat pemersatu yang menghargai perbedaan agama dan kepercayaan, perbedaan suku,

perbedaan warna kulit, perbedaan budaya. Situasi menjadi lebih runyam ketika terjadi kekerasan, aparat keamanan sebagai perpanjangan tangan negara ternyata tidak mampu memberikan rasa aman bagi setiap warga negaranya, atau negara tidak hadir saat dibutuhkan oleh masyarakat. Situasi semacam itu sungguh memprihatinkan kita semua sebagai anak bangsa dan perlu disikapi secara serius.

Kondisi itu diperparah dengan tidak adanya bentuk sosialisasi yang sistematis, massif, dan terstruktur di tengah-tengah masyarakat tentang Pancasila. Sehingga lumrah apabila mayoritas mahasiswa hanya mengandalkan pengetahuan dan wawasan tentang Pancasila berasal dari materi kuliah *an sich*. Karena di lingkungan masyarakat sendiri juga tidak ada lagi pola yang jelas dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada warga Negara. Pancasila kurang dianggap sebagai entitas yang penting dan berarti bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Sehingga tidak mengherankan sering kali dalam

kehidupan masyarakat timbul perilaku yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila.

Menurut Slamet Sutrisno (2013:9) dalam tataran prakteknya, Pancasila yang agung itu bernasib "Pancasial" Muncul kesialan-kesialan disekujur sila pertama sampai kelima ;

a) Untuk sila Ketuhanan Yang Maha Esa, cendekiawan muslim Syafii Ma'arif menyatakan tidak ada korelasi antara peningkatan ibadah keagamaan dengan kesalehan sosial. Pesan Soekarno dengan sila Ketuhanan yang berkebudayaan makin dikebiri dimana dalam pelaksanaannya asma Tuhan terlalu sering diklaim *dan* diinfaatkan guna memamerkan kesewenangan dengan kekerasan dan keberingasan. Bahkan eendekiawan tadi nyata-nyata memperingatkan inasyarakai akan adanya apa yang dinamakan "preman- pretnan berjubah." Sistem theology tertentu dipakai sebagai alat penghakiman system tehologi lainnya. balikan dalain lingkup inter-agama pun terjadi

penghakiman dengan iniplikasi pengkhafiran yang sesungguhnya menjadi hak Tiihan sebagaimana sorga, neraka dan permaafan adalah hak prerogatif-Nya, demikian Quraish Shihab.

b) Kemanusiaan yang adil dan beradab pasti tidak bakal abai terhadap HAM. bahkan sila ke dua itu menipakan basis dan reservoir HAM. Namun di ranah empiris. nasib berbagai pekerja dan buruh. TKW. tamatan sekolah bahkan para sarjana, guru wiyata bakti, mereka kaum dhuafa dan usia sepuh, para pasien berkantong tipis masih saja kalah perlakuaunya dengan negeri jiran semisal Malaysia dan Singapura. Sering justru terjadi perlakuan-perlakuan biadab di negri yang mengaku berdasarkan Pancasila seperti vonis hakim yang mengabaikan rasa keadilan. pundi-pundi aparaturnegara yang kelewat batas dibandingkan dengan penghasilan resmi dan system pendidikan yang anti-budaya berhubung praktek kependidikan justru ditindis oleh sang system

itu sendiri. Salah satu fakta ikonik negatifnya adalah Ujian Nasional yang memberikan terror kepada guru dan murid.

- c) Persatuan Indonesia adalah sila yang mengajarkan Wawasan Kebangsaan, pluralisme, multikulturalisme dan Nasionalisme. Betapa sial nasibnya kini. Persatuan berisi kerukunan dan saling tepa slira. toleran dan solidaritas dan serangkaian sikap dan karakter itu kini bukan hanya merosot melainkan meruyak dan rusak. Wawasan Nusantara sebagai kristalisasi spirit kebangsaan hancur. provinsionalisme dan egoisine SARA justru mengecambah. Dalam kesialan yang lain patriotisme sebagai sifat dasar Nasionalisme ambruk dengan banyaknya praktek-praktek komunalisme sikap dengan arogansi dan snobisme perilaku, korupsi kakap dan neofeodalisme. Semangat bela tanah air yang bangkit dengan jutaan pemuda mendaftarkan diri sebagai sukarelawan Trikora tahun 1963. tidak lagi dikenal.

- d) Sila ke empat direduksi dalam distorsi kedaulatan individu. bukan kedaulatan rakyat. Kalau pun kedaulatan rakyat. dalam Pancasila prinsip ini masih diwadahi dan dijiwai oleh paradigma kerakyatan dan pennusyawaratan yang adalah ide- ide vital sila Kerakyatan yang dipirnpin oleh tiikmat kebijaksanaan dalrn pennusyawaratan/perwakilan.

Intervensi paham demokrasi liberal yang berpijak pada individulisme berjalan makin massif, sehingga mekanisme voting dipraktekkan di mana-mana. Soekarno menyatakan bahwa demokrasi di Indonesia bukan "mayorokrasi" dan "minorokrasi." Di lain pihak. kesialan sila ke empat ini terletak dalam ketidaksiapan masyarakat dalam menjalankan demokrasi. dimana menuMt RH Soltau: demokrasi selalu diisi oleh cirri- ciri- cm: tidak adanya poemaksaan pikiran dan tindakan, kematangan pelaku-pelakunya, kecukupan

rasionalitas dan prinsip solusi masalah dengan jalan damai.

- e) Sila ke lima sering dikatakan yang paling sial dimana yang dicapai sampai saat ini barulah sckadar "Keadilan sosial bagi sebagian kcdl rakyat Indonesia." Kermduan rakyat di desa- dcsa akan "kehadiran kembali" Pak Harto tidak terlepas daii fakta ketidakadilan sosial-ekonomi dan politik masa kini dimana sulit dibantah adanya kenyataan "yang kaya semakin kaya. yang miskin semakin miskin." Kesemrawutan pembagiart rejeki dari zakat islami dan angpao di saat perayaan Imlek yang mernperlihatkan mereka yang antre terinjak-injak adalah bukti telanjang kesialan sila ke lima Foto- foto mcngcnaskan yang mcmpcrlihatkan seorang pcrmpuan scpuh meratapi nasib kenapa tak terdaftar sebagai penerima BLSM, adalali bukti keroposnya perealisasian keadilan sosial. Sampai di sini perlu dicamkan arti penting Pancasila sebagai gagasan besar seorang keindonesiaan yang

seharusnya sanggup mendorong kesadaran kolektif kebangsaan yang rasanya makin hari terus melorot mutu aplikasinya.

Karena itu peneliti berasumsi bahwa sangat diperlukan semacam revitalisasi Pancasila sekaligus mencari model implementasi nilai-nilai Pancasila yang relevan dan sesuai dengan dinamika yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Namun karena belum ada cara yang tepat bagaimana mereka meresapi dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu sehingga masyarakat tidak tahu apakah apa yang mereka lakukan sehari-hari itu sesuai atau bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Mereka sekedar menjalani rutinitas hidup tanpa pernah merefleksikan dengan pedoman hidup dan jati diri bangsa Indonesia yakni Pancasila

Mencari model implementasi nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat di Kabupaten Madiun, sangat dibutuhkan untuk mendapatkan pola-pola yang relevan dan tepat sesuai dengan perubahan zaman. Model ini selain untuk merevitalisasi nilai-nilai Pancasila itu

sendiri, juga untuk mencari formulasi yang tepat untuk mendorong agar Pancasila diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

## **TINJAUAN TENTANG PANCASILA**

Dalam bagian pembukaan UUD 1945 yang terdiri atas empat alinea tersebut tercantum rumusan Pancasila sebagai berikut:

- a) Ketuhanan Yang Maha Esa
- b) Kemanusiaan yang adil dan beradab
- c) Persatuan Indonesia
- d) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan
- e) Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rumusan Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 inilah yang secara konstisional sah dan benar sebagai dasar negara Republik Indonesia, yang disahkan oleh PPKI yang mewakili seluruh rakyat Indonesia.

Rumusan Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai platform demokratis berbagai golongan

khususnya dari kaum kebangsaan dan Islam.

Pancasila ditransformasikan menjadi konsep politik dalam konteks pemikiran politik Indonesia sebagai dasar negara berisi lima prinsip. Pancasila yang diakui pemerintah secara resmi rumusannya berbunyi sebagai berikut :

- 1) Ketuhanan Yang Maha Esa
- 2) Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
- 3) Persatuan Indonesia
- 4) Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
- 5) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Pancasila sebagai dasar filsafati negara Indonesia pada hakekatnya merupakan suatu nilai-nilai yang bersifat sistematis. Sebagai suatu dasar filsafat, sila-sila dalam Pancasila atau kelima sila yang ada di dalamnya merupakan suatu sistem yaitu merupakan satu kesatuan yang bulat, hierarkis dan sistematis, maka kelima sila bukan terpisah pisah melainkan memiliki makna yang utuh yang merupakan sistim nilai (Kaelan,2000:98). Hal ini

sesuai dengan pengertian sebelumnya bahwa dasar negara terkandung didalamnya seperangkat nilai. Nilai adalah sesuatu yang berharga, berguna, indah, memperkaya batin, dan menyadarkan manusia akan harkat dan martabatnya. Nilai berfungsi pada budi yang berfungsi mendorong dan mengarahkan sikap dan perilaku manusia. Alport dalam (Syahrial 2011:33) mengidentifikasi nilai-nilai yang terdapat dalam kehidupan masyarakat pada enam macam, yaitu nilai teori, nilai ekonomi, nilai estetika, nilai sosial, nilai politik dan nilai religi. Notonegoro dalam (Syahrial 2011:34) membagi nilai dalam tiga kategori yaitu sebagai berikut:

- a) Nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur manusia
- b) Nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk melakukan aktivitas
- c) Nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Nilai kerohanian dapat dirinci menjadi empat macam yaitu sebagai berikut:

- 1) Nilai kebenaran yaitu bersumber pada unsur rasio manusia, budi dan cipta.
- 2) Nilai keindahan yaitu bersumber pada unsur rasa atau intuisi.
- 3) Nilai moral yaitu bersumber pada unsur kehendak manusia atau kemauan (karsa, etika).
- 4) Nilai religi yaitu bersumber pada nilai ketuhanan merupakan nilai kerohanian yang tertinggi dan mutlak. Nilai ini bersumber pada keyakinan dan keimanan manusia terhadap Tuhan. Nilai religi ini berhubungan dengan nilai penghayatan yang bersifat transedental dalam usaha manusia untuk memahami arti dan makna kehadirannya di dunia. Nilai ini berfungsi sebagai sumber moral yang dipercayai sebagai rahmat dan ridha Tuhan. Oleh karena itu nilai berperan sebagai dasar pedoman yang menentukan kehidupan setiap manusia. Pancasila berisi lima nilai yang merupakan nilai dasar

fundamental bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan nilai keadilan. Nilai-nilai Pancasila merupakan rumusan ideal, bersifat *das sollen* dan cita-cita yang harus di implementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

### **1. Implementasi Pancasila**

Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa yang digagas oleh *foundhing fathers* bangsa, hingga kini dalam implementasinya mengalami distorsi dan persoalan metode yang tepat agar Pancasila sebagai ideologi terbuka mampu menjawab kompleksitas problematika bangsa sepanjang masa. Meskipun secara historis telah mendapatkan dasar hukum yang kuat. Winarno (2012:79) memaparkan pengamalan Pancasila sebagai idiologi.

Berdasarkan ketetapan MPR RI No XVIII/ MPR/1998 tersebut kita dapat mengatakan bahwa Pancasila sebagai deologi nasional berarti nilai-nilai yang terkandung didalamnya merupakan tujuan dan cita-cita nasional negara. nilai-nilai

Pancasila memang merupakan cita-cita bangsa yaitu kita menginginkan masyarakat Indonesia yang adil dan nakmur yang berdasar dan selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila merupakan cita-cita luhur bangsa sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945.

Sebagai cita-cita luhur bangsa maka sudah sewajarnya cita-cita itu diwujudkan dalam pengamalan penyelenggaraan bernegara. Pancasila sebagai cita-cita bangsa perlu diamalkan dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara.

Salah satu wujud pengamalan tersebut tercermin dalam ketetapan MPR No. VII/ MPR /2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan. Dalam ketetapan tersebut dinyatakan bahwa Visi Indonesia Masa Depan terdiri dari tiga visi, yaitu:

- a. Visi ideal, yaitu cita-cita luhur sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu pada alenia kedua dan keempat,

b. Visi antara, yaitu Visi Indonesia 2020 yang berlaku sampai dengan tahun 2020, dan

c. Visi lima tahunan, sebagaimana termaktub dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara.

Pada Visi antara dikemukakan bahwa Visi Indonesia 2020 adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri, serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara. Untuk mengukur tingkat keberhasilan perwujudan Visi Indonesia 2020 dipergunakan indikator-indikator utama sebagai berikut.

- 1) Religius yakni yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan jujur, toleransi antar dan antara umat beragama dan terwujudnya penghormatan terhadap martabat kemanusiaan.
- 2) Manusiawi yakni yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan, harmonis antar manusia Indonesia tanpa membedakan latar belakang

budaya, suku, ras, agama dan lain-lain, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam perilaku.

- 3) Bersatu yakni yang semangat persatuan dan kerukunan bangsa; toleransi, kepedulian, dan tanggung jawab sosial; budaya dan perilaku sportif serta menghargai dan menerima perbedaan dalam kemajemukan; semangat antikekerasan; dialog secara wajar dan saling menghormati antarkelompok dalam masyarakat.
- 4) Demokratis yakni adanya keseimbangan kekuasaan antara lembaga penyelenggara negara dan hubungan kekuasaan antara pemerintahan nasional dan daerah; menguatnya partisipasi politik, transparansi, akuntabilitas, jujur, sportif, menghargai perbedaan, terbuka, adanya kontrol dan berkembangnya sistem kepemimpinan yang egaliter dan rasional.
- 5) Adil yakni tanpa diskriminasi; institusi dan aparat hukurn yang bersih dan profesional;

penegakan hak asasi manusia; keadilan gender; budaya penghargaan dan kepatuhan terhadap hukum; dan adil dalam distribusi.

- 6) Sejahtera yakni adanya kesempatan kerja dan meningkatnya pendapatan penduduk sehingga bangsa Indonesia menjadi sejahtera dan mandiri; meningkatnya angka partisipasi murni anak usia sekolah; terpenuhinya sistem pelayanan umum; tercapainya hak atas hidup sehat; meningkatnya indeks pengembangan manusia; pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang adil, merata, ramah lingkungan dan berkelanjutan; dan terwujudnya keamanan dan rasa aman.

- 7) Maju, Mandiri, Baik dan Bersih dalam Penyelenggaraan Negara.

Mewujudkan bangsa yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil dan sejahtera pada dasarnya adalah upaya menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai cita-cita bersama.

Sebagai ideologi nasional, nilai-nilai dasar Pancasila menjadi cita-cita masyarakat Indonesia yang sekaligus menunjukkan karakter bangsa yang hendak dibangun, Karakter, identitas atau jati diri sebuah bangsa bukanlah sesuatu yang telah jadi. Karakter adalah hasil konstruksi dan produk dari pembudayaan melalui pendidikan. Jati diri bangsa merupakan sesuatu yang telah disepakati, seperti cita-cita masa depan bersama (HAR Tilaar, 2007). Jati diri bangsa Indonesia adalah terwujudnya karakter bangsa yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis dan adil (ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2001. Karakter bangsa yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis dan adil tiada lain adalah cerminan Pancasila sebagai identitas. Di sisi lain identitas bangsa ditunjukkan dengan kesepakatan bangsa untuk menggunakan prinsip kebangsaan, prinsip kemanusiaan, prinsip keadilan, prinsip kerakyatan dan prinsip Ketuhanan didalam kerangka memecahkan masalah kebangsaan.

Menurut Anhar Gonggong, sejarawan UI (Kompas 1/6/2011), semua rezim yang memerintah Indonesia sejak merdeka hingga saat ini dinilai gagal dalam menjalankan Pancasila sebagai ideologi negara dengan benar. Hendy Tedjonagoro (2007:5), mengemukakan metode yang pernah digunakan dalam penerapan nilai-nilai Pancasila. Pada zaman Soekarno berkuasa dipakai metode indoktrinasi yang lebih bercorak memaksakan kehendak “Penguasa” di era demokrasi terpimpin pada usaha “nasakom”. Pada zaman Soeharto berkuasa, dipakai metode penataran P4, setengah dipaksa samar-samar dalam era demokrasi Pancasila namun pada akhir periode terjadi penyimpangan. Pada zaman Reformasi dan era globalisasi ini, kita menghadapi dua kendala / tantangan dari luar negeri dan dalam negeri dimana ideologi / falsafah Pancasila dan paham kebangsaan mulai bergoyang, terombang ambing ke kanan dan ke kiri.

Berbagai upaya dalam rangka revitalisasi Pancasila dilakukan melalui seminar dan

lokakarya oleh para pakar seperti M.Noor Syam (Program pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi dalam era reformasi), Winarno Surachmad (Pendidikan Pancasila pendekatan yang mengindonesiakan), Hendy Tedjonagoro (Metode integral partisipatif pendidikan Pancasila), Ajar Triharso (Pendidikan Pancasila Partisipatif P3), Siswono Yudo Husodo (Reaktualisasi wawasan kebangsaan dalam rangka meneguhkan NKRI). Muara dari berbagai ide para pakar itu adalah agar Pancasila dapat kokoh dan tegak sebagai salah satu pilar bangsa disamping UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, maka Implementasi nilai-nilai Pancasila itu perlu dilakukan dengan memperkuat kembali fundamen etis dan karakter bangsa berdasarkan falsafah dan pandangan bangsa Indonesia.(Yudi Latif, Kompas 29/3/11).

## **2. Revitalisasi Pancasila**

Revitalisasi berarti proses, cara, perbuatan, menghidupkan atau menggiatkan kembali. Revitalisasi Pancasila merupakan upaya untuk menggiatkan kembali atau mengaktifkan nilai-nilai Pancasila

dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara ditengah perkembangan dunia yang makin mengglobal guna meneguhkan jati diri bangsa. Mengingat begitu penting kedudukan dan fungsi nilai dasar Pancasila dapat dilukiskan sebagai berikut :

- a. Warisan sosio budaya bangsa
- b. Pandangan hidup bangsa (*weltanschauung*)
- c. Jiwa dan kepribadian bangsa; jatidiri nasional (*volkgeist*) Indonesia
- d. Dasar negara (proklamasi, pembukaan UUD 45): asas kerokhanian bangsa, jiwa UUD 45, *grundnorm*, *basic norm*, sumber dari segala sumber hukum.
- e. Ideologi negara, ideologi nasional.
- f. Sistem filsafat Pancasila, filsafat dan budaya indonesia : asas dan moral politik NKRI
- g. Sistem nasional

Revitalisasi adalah upaya mengembalikan kepada asal nilai pentingnya segala sesuatu. Sedangkan nilai-nilai Pancasila adalah segala bentuk norma, aturan serta nilai yang diserap dari berbagai adat-istiadat dan budaya yang

berakar dari kemajemukan seluruh komponen bangsa Indonesia. Artinya nilai-nilai Pancasila merupakan intisari dari pola pikir (*mind-sett*), pola sikap dan pola tindakan dari setiap individu bangsa Indonesia yang identik dengan keberbedaan suku, agama, ras,' antar golongan (SARA), wilayah, bahasa dan ada-istiadat.

Jadi revitalisasi nilai-nilai Pancasila adalah usaha bersama seluruh komponen bangsa Indonesia untuk mengembalikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai konsensus sekaligus identitas nasional yang selama ini mengalami berbagai penyimpangan kepada asal-muasal kemunculannya untuk dijadikan kembali sebagai instrumen ketauhidan, dasar dan ideologi, alat pemersatu, pedoman sekaligus tujuan, orientasi dan alat ukur serta evaluator kebijakan, pola interaksi simbiosis-mutualis dengan bangsa lain serta sebagai arah dan semangat kebersamaan dari setiap individu bangsa Indonesia tanpa terkecuali sehingga sesuai dengan cita ideal para pendiri bangsa (*founding fathers*). Singkatnya, revitalisasi

mamiliki arti bahwa nilai-nilai yang telah "menyejarah" dalam kehidupan bangsa Indonesia terdahulu dimunculkan kembali dalam sejarah kehidupan baru bangsa Indonesia pasca reformasi yang telah disalahartikan menjadi kebebasan yang kebablasan.

Karena begitu pentingnya fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, pandangan hidup bangsa, falsafah hidup bangsa, idiologi negara, perjanjian luhur rakyat Indonesia, dasar negara republik Indonesia, sumber hukum nasional maka, Pancasila harus direvitalisasi.

Ali Muhandi dkk (2011:306) mengajukan pertanyaan dan argumentasi pentingnya revitalisasi Pancasila. Mengapa perlu revitalisasi? Apakah nilai-nilai Pancasila tidak lagi dipakai oleh bangsa ini? Bagaimana cara memberikan pemahaman serta implementasi nilai-nilai Pancasila dalam keseharian hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ke depan? Beragam pertanyaan mendasar tersebut merupakan bagian dan

tanggungjawab seluruh komponen bangsa sebagai pemilik masa depan bangsa ini pasca reformasi 21 Oktober 1998 lalu. Mau dibawa kemana arah bangsa ini sangat bergantung pada sejauhmana komitmen seluruh komponen bangsa ini untuk mendalami, menjiwai, menghayati dan mengamalkan substansi nilai-nilai Pancasila dalam kenyataan hidup sehari-hari utamanya pasca reformasi, saat ini dan di masa-masa mendatang.

Hakikat Pancasila adalah nilainya bukan simbolnya, karena substansi nilai akan muncul setelah setiap individu bangsa melaksanakan apa yang menjadi kepribadian dan pandangan hidup sehari-harinya.

Pancasila adalah komitmen final bangsa Indonesia. Pancasila tidak ada pembandingnya di dunia ini. Tanpa Pancasila Indonesia tidak ada atau tidak akan eksis. Oleh karena itu, jika ada kekuatan yang melakukan penyimpangan secara sistematis dan mengarah pada perpecahan (*disintegrasi bangsa*) yang dilakukan oleh siapapun dan kapanpun, maka Pancasila merupakan solusi terakhir bagi

terwujudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Karena Pancasila secara empiris telah teruji dari masa ke masa, dengan melewati berbagai orde, yakni orde lama, orde baru dan orde reformasi, meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa dalam perjalanannya ada berbagai macam cobaan dan tantangan yang senantiasa datang dan mengiringi dalam setiap gerak dan langkah dinamika bangsa ini.

Pancasila adalah ideologi yang tidak ada bandingannya untuk bangsa Indonesia karena Pancasila adalah alat pemersatu bagi seluruh komponen yang berbeda-beda, sehingga setiap upaya untuk menggantinya selalu akan berhadapan dengan seluruh kekuatan bangsa Indonesia secara menyeluruh. Pancasila adalah simbol kebhinneka-an Indonesia. Berbeda namun tetap satu jua.

Merevitalisasi nilai-nilai Pancasila adalah sebuah keniscayaan mutlak ketika kondisi bangsa semakin jauh dari keadilan sosial, kemakmuran, kemajuan dan lain sebagainya. Membiarkan kondisi bangsa dalam keterpurukan sama

halnya menjadikan Pancasila hanya sebagai alat politisasi untuk melanggengkan kekuasaan seperti yang pernah terjadi pada masa Orde Baru.

Sejarah telah mencatat dan semua komponen bangsa tidak memungkirinya, bahwa pada periode orde baru, Pancasila selalu dijadikan alat legitimasi serta dipolitisir untuk meraih serta mempertahankan kekuasaan.

Mereka yang berseberangan dengan pemerintah akan dengan mudah diberi label anti Pancasila dan dengan mudah pula mereka divonis sebagai tindakan subversif sehingga akan masuk penjara tanpa proses hukum yang jelas.

Revitalisasi tentu suatu upaya sistematis dalam rangka kembali membangun spirit nasionalisme yang selama ini telah mengalami kemunduran sehingga seluruh persoalan kebangsaan seperti konflik politik, hukum, ekonomi, agama, etnis serta permasalahan dalam apapun bentuknya bisa dengan mudah teratasi. Ini menjadi agenda penting yang harus secepatnya

dilakukan ketika semangat persatuan menjadi barang langka di negeri ini.

Pada sisi lain, revitalisasi juga merupakan bentuk penyadaran bagi masyarakat bahwa hidup di Indonesia harus memiliki kesiapan lahir bathin, baik mental maupun spiritual untuk saling menghargai perbedaan, menghormati keragaman suku, agama/ ras dan antar golongan yang satu dengan lainnya memiliki kepentingan yang tentunya berbeda namun dalam wadah satu yakni Indonesia. Dalam konteks ini, maka membangun komitmen revitalisasi nilai-nilai Pancasila merupakan suatu kebutuhan utama saat ini.

Hal ini menjadi penting mengingat Pancasila sebagai ideologi bangsa, telah mulai dilupakan oleh masyarakat. Hal ini dapat terlihat dari berbagai perkembangan dari tahun 1998 hingga saat ini banyak sekali fenomena kasus yang jauh dari nilai-nilai Pancasila, baik dalam domain politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya maupun etnik, sehingga dapat berakibat pada instabilitas dan disintegrasi bangsa yang mengutamakan NKRI. Padahal, upaya dalam rangka

mencari ideologi yang sesuai untuk bangsa Indonesia tidak semudah membalikkan telapak tangan.

Pancasila tidak secara mudah dilahirkan namun lahirnya Pancasila telah melewati perdebatan panjang dan tidak jarang diwarnai dengan pertikaian sengit (beradu argumentasi) mengenai dasar apa yang cocok untuk Negara Indonesia yang mempunyai karakter majemuk (plural). Dicetuskannya Pancasila berangkat dari sebuah pertimbangan bahwa Pancasila adalah satu-satunya ideologi yang menjadi konsensus nasional yang bisa diterima oleh semua golongan yang ada di Indonesia.

Dengan lima sila yang tercantum dalam Pancasila menunjukkan bahwa Pancasila telah mengutamakan kepentingan bersama mengingat bangsa Indonesia yang majemuk. Globalisasi merupakan suatu konsekuensi logis sebagai bangsa yang memiliki keharusan berinteraksi dengan dunia luar. Menguatnya politik identitas pada tahun-tahun terakhir ini memberikan penyadaran bahwa kelangsungan hidup bangsa Indonesia bisa

terancam sewaktu-waktu. Menguatnya praktik intimidasi, kekerasan dan konflik dalam berbagai domain kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bisa menjadi bom waktu kehancuran NKRI. Jika praktik-praktik tersebut tidak segera dihentikan, maka rakyat akan menderita dan keutuhan bangsa ini akan terancam.

Sehubungan dengan hal tersebut, revitalisasi nilai-nilai Pancasila harus dilakukan dalam dua tingkatan, yaitu pada tataran ide dan praksis. Dalam tataran ide/ hal yang paling penting dilakukan adalah menjawab sikap alergi masyarakat terhadap Pancasila. Oleh karena itu, memiliki semangat dan sikap bergotong royong serta membudayakan pola musyawarah bisa dijadikan mekanisme dan cara yang efektif dalam kehidupan sehari-hari seluruh bangsa ini. Sikap gotong-royong dan musyawarah juga bisa dijadikan sebagai sumber dalam rangka revitalisasi nilai-nilai Pancasila.

Dalam tataran praksis, utamanya menyangkut relasi

penyelenggaraan negara dan masyarakat, revitalisasi nilai-nilai Pancasila harus dimulai dengan membangkitkan kegairahan dan optimisme publik. Misalnya, kepemimpinan nasional harus menegaskan kembali bahwa Negara Republik Indonesia adalah bukan negara agama tapi negara beragama, Indonesia adalah negeri yang kebebasannya berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Bhinneka Tunggal Ika, yang harus memiliki sikap saling hormat-menghormati, menghargai segala perbedaan dan mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi dan golongan.

Oleh karena itu, beragam gerakan radikalisme dan anarkisme serta mengatasnamakan agama yang kian menjamur di bumi Indonesia 12 tahun pasca reformasi sejatinya harus menjadi musuh bersama antara pemerintah dan masyarakat secara luas. Sebagai ilustrasi kasus-kasus terkini, dari soal, ego kedaerahan (primordialisme), konflik horizontal dan vertikal, gerakan Jama'ah Islamiyah (JI) serta jaringan al-Qaeda lainnya, jama'ah ahmadiyah

dengan penodaan terhadap Islam sampai dengan persoalan yang kini kian marak yakni gerakan bawah tanah (*under ground*) yang sangat rapi dan sistematis Negara Islam Indonesia (Nil) yang korbannya bukan saja masyarakat tradisional yang sangat mudah dihegemoni, tapi justru mahasiswa di berbagai perguruan tinggi pun menjadi basis jaringan peiekrutan mereka.

Berbagai fenomena krusial diatas, menunjukkan bahwa Indonesia saat ini masih sangat rentan terjadi berbagai potensi masalah kebangsaan yang kontra-produktif dengan semangat nilai-nilai Pancasila. Ini merupakan referensi paling penting untuk melakukan retrospeksi secara nasional seluruh komponen bangsa ini, tanpa terkecuali, baik pemerintah maupun masyarakat. Retrospeksi adalah jalan satu-satunya untuk memperbaiki keadaan bangsa ini ke depan. Baik buruknya bangsa ke depan, adalah sangat bergantung pada kegigihan dan kesungguhan komitmen generasi saat ini untuk menemukan kembali jatidiri bangsa melalui penanaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dari beberapa ilustrasi tersebut, secara bertahap, nilai-nilai Pancasila akann benar-benar menginternalisasi dan membumi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Revitalisasi nilai-nilai Pancasila mendesak dilakukan karena beberapa alasan internal dan eksternal. Secara internal, sejak masa berlangsungnya masa reformasi tahun 1998, beberapa faktor pemersatu bangsa jelas mengalami kemerosotan. Secara eksternal, adanya pengaruh kekuatan transnasional dan globalisasi, yang tidak hanya menimbulkan dis-orientasi dan dis-alokasi sosial, tetapi juga mengakibatkan memudarnya identitas nasional Negara Republik Indonesia. Globalisasi hakikatnya tidak hanya memiliki nilai positif, sebaliknya justru lebih banyak menimbulkan nilai negatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Revitalisasi nilai-nilai Pancasila bisa dimulai dengan menjadikan dasar negara ini kembali sebagai pembicaraan publik,

sehingga masyarakat merasakan bahwa Pancasila masih ada, dan masih dibutuhkan bagi bangsa Indonesia. Revitalisasi nilai-nilai Pancasila juga dapat dilakukan dengan cara manifestasi identitas nasional. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai wawasan, antara lain; spiritual yang berlandaskan etik, estetika, dan religiusitas sebagai dasar dan arah pengembangan profesi.

Dalam konteks dunia perguruan tinggi, revitalisasi nilai-nilai Pancasila bisa dilakukan dengan menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang profesional dan handal untuk pembangunan nasional yang menumbuhkan kesadaran nasionalisme serta menemukan jati diri bangsa yang mampu beradaptasi dengan perubahan, mampu menangkap tantangan sebagai peluang dan mampu mengatasi segala permasalahan dengan solusi yang baik, serta mengaktualisasikan diri untuk bangsa dan negara agar lebih maju dan bermartabat.

Diperlukan langkah untuk menyegarkan (revitalisasi) dan memberi semangat pada

implementasi Pancasila pada keseharian kehidupan masyarakat dan pada penyelenggara negara. Pancasila sebagai ideologi terbuka dapat memberi dasar kuat bagi kehidupan berbangsa dan memberi peluang munculnya pemikiran dan kekuatan baru yang dinamis.

Dalam bukunya, *Selamat Tinggal Mitos, Selamat Datang Realitas* (2002), dalam Hajriyanto (2013:2), cendekiawan Kuntowijoyo pernah mengajukan tesis tentang radikalisasi Pancasila sebagai solusi atas keterpurukan dan ancaman disintegrasi bangsa. Yang dimaksud dengan radikalisasi di sini adalah sebuah upaya untuk secara mendaiarn menggai nilai-nilai iuhur Pancasila dan mendialektikannya dengan realitas kehidupan berbangsa. Kuntowijoyo menawarkan lima konsep radikalisasi, yakni: (1) mengembalikan Pancasila sebagai ideologi negara; (2) mengganti persepsi dari Pancasila sebagai ideologi menjadi Pancasila sebagai ilmu; (3) mengusahakan Pancasila mempunyai konsistensi dengan produk-produk perundangan, koherensi antasila, dan

korespondensi dengan realitas sosial; (4) Pancasila yang sernula melayani kepentingan vertikal menjadi Pancasila yang melayani kepentingan horizontal; dan (5) menjadikan Pancasila sebagai kritik kebijakan negara.

Menurut Siswono (2010:11), Revitalisasi Pancasila perlu menekankan pada orientasi ideologi yang mewujudkan kemajuan yang pesat, menjadi bangsa yang unggul di berbagai bidang dengan kesejahteraan yang tinggi dan persatuan yang mantap dari seluruh rakyat Indonesia. Tekad untuk unggul di berbagai bidang menjadi “semangat kebangsaan baru” bagi kaum muda di negara negara lain.

Revitalisasi Pancasila sebagaimana manifestasi identitas nasional, pada gilirannya harus diarahkan juga pada pembinaan dan pengembangan moral, sehingga moralitas Pancasila dapat dijadikan dasar dan arah dalam upaya untuk mengatasi krisis dan disintegrasi yang cenderung sudah menyentuh ke semua segi dan sendi kehidupan. Harus kita sadari, bahwa moralitas Pancasila akan menjadi tanpa makna

dan menjadi sebuah “karikatur”, apabila tidak disertai dukungan suasana kehidupan di bidang hukum secara kondusif. Moralitas yang tidak didukung oleh kehidupan hukum yang kondusif, akan menjadi subjektifitas yang satu sama lain akan saling berbenturan. Sebaliknya ketentuan hukum yang disusun tanpa disertai dasar dan alasan moral, akan melahirkan suatu legalisme yang represif, kontra produktif dan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri.

Dalam revitalisasi Pancasila sebagai manifestasi identitas nasional, penyelenggaraan MPK hendaknya dikaitkan dengan wawasan berikut ini:

- a. Spiritual, untuk meletakkan landasan etik, moral, religiusitas, sebagai dasar dan arah pengembangan sesuatu profesi.
- b. Akademis, untuk menunjukkan bahwa MPK merupakan aspek being yang tidak kalah pentingnya bahkan lebih penting dari pada aspek having dalam rangka penyiapan SDM yang bukan sekedar instrumen adalah

- subjek pembaharuan dan pencerahan.
- c. Kebangsaan, untuk menumbuhkan kesadaran nasionalismenya agar dalam pergaulan antar bangsa tetap setia pada kepentingan bangsanya, bangga dan respek pada jati diri bangsanya.
  - d. Mondial, untuk menyadarkan bahwa manusia dan bangsa dimasa kini siap menghadapi dialektikanya perkembangan masyarakat dunia yang terbuka. mampu untuk segera beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dengan cepat dan mampu pula mencari jalan keluarnya sendiri dalam mengatasi setiap tantangan yang dihadapi, dan pengaruh perkembangan iptek telah menjadi sesuatu yang substantif dalam kehidupan umat manusia bukan hanya sebagai tantangan melainkan juga peluang untuk berkarya.(Syahrial 2011: 208).

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Desain Penelitian**

Jenis penelitian yang kami lakukan adalah tergolong penelitian

deskriptif kualitatif. Menggali informasi yang mendalam tentang revitalisasi Pancasila di tengah-tengah masyarakat sekaligus mencari model implementasi nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat di Kabupaten Madiun relevan dengan tipe penelitian ini.

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel adalah revitalisasi Pancasila dan model implementasi nilai-nilai Pancasila.

Revitalisasi Pancasila adalah usaha bersama seluruh komponen bangsa Indonesia untuk menggiatkan kembali nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Implementasi nilai-nilai pancasila adalah penerapan nilai-nilai Pancasila untuk memperkuat kembali karakter dan jati diri bangsa Indonesia.

Sampel informan dipilih secara selektif dan dilakukan secara mengalir dengan penyesuaian berkelanjutan sehingga semakin banyak narasumber semakin dipusatkan pada fokus studi. Pemilihan sampel berakhir jika telah

terjadi perulangan. Pemilihan informan dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kemandirian peneliti dalam memperoleh data. Informan dipilih berdasarkan keterlibatan informan terkait dengan tema penelitian.

Data yang dibutuhkan adalah dari sumber primer dan sekunder. Data primer yang berupa keterangan atau fakta di lokasi penelitian diperoleh dari informan, dan peristiwa atau aktivitas. Data sekunder berupa dokumen dan arsip tentang objek penelitian, baik berupa dokumen kurikulum, buku sumber pembelajaran maupun data lain yang terkait, seperti majalah dan surat kabar.

Pengumpulan data primer dilakukan dengan teknik wawancara mendalam dan observasi langsung. Wawancara dilakukan khusus dengan stakeholder di kabupaten Madiun. Artinya teknik menggali data dilakukan secara mengalir dan alamiah atau yang sering disebut sebagai metode *snowball sampling*.

Selain itu pengumpulan data juga dilakukan melalui *Focus Group Discussion* (FGD). FGD merupakan

teknik penggalan data yang dilakukan dengan menggunakan pertanyaan secara terfokus. FGD tidak dimaksudkan untuk memperoleh kesepakatan/konsensus dari para peserta yang hadir tetapi untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam baik berupa pengalaman, opini, sikap, harapan dari peserta yang diharapkan mewakili kelompok tertentu. Adapun yang terpilih untuk terlibat dalam FGD adalah 20 stakeholder yang akan dipilih secara selektif menurut kriteria yang ditentukan peneliti.

Validasi data dilakukan melalui teknik *triangulasi* sumber, yaitu dengan cara membandingkan data dari satu sumber data yang satu dengan sumber data yang lain, triangulasi teknik, yaitu membandingkan data dari satu teknik pengumpulan data dengan teknik yang lain, dan triangulasi peneliti, yaitu membandingkan data yang diperoleh anggota tim peneliti dengan anggota peneliti yang lain.

Analisis data dilakukan dengan metode analisis data kualitatif. Ada dua cara yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu

analisis isi dan analisis interaktif. Untuk data dokumen dan arsip digunakan analisis isi, sedangkan untuk data hasil wawancara dan observasi digunakan analisis interaktif, seperti dikemukakan Milles dan Huberman (1996).

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan berkaitan dengan revitalisasi Pancasila, mayoritas mengatakan bahwa Pancasila sebagai dasar negara dan kepribadian bangsa penting untuk direvitalisasi, karena Pancasila dapat dijadikan pedoman atau dasar dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekaligus menguatkan kembali Pancasila sebagai jati diri bangsa. Urgensi Pancasila adalah untuk menjamin eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia di tengah pluralitas yang terus berkembang. Disisi lain Pancasila penting sebagai rujukan utama membenahi kompleksitas masalah yang mendera bangsa Indonesia dewasa ini.

Pentingnya merevitalisasi Pancasila dalam era reformasi dan demokrasi dewasa ini yang terjadi perubahan cepat dan kompleks dan

tantangan yang dihadapi tidak kecil, karena bangsa dan negara Indonesia seolah berjalan tanpa panduan dan arah yang jelas menyimpang dari cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial yang berdasarkan Pancasila.

Upaya mengelola perubahan itu harus mengacu pada nilai-nilai dasar Pancasila yang menekankan ketuhanan, kesatuan, kemanusiaan, demokrasi dan keadilan sosial agar tidak kehilangan orientasi.

Dengan kata lain bangsa dan negara ini sedang mengalami anomie yaitu ditinggalkannya nilai-nilai budi pekerti masyarakat yang luhur (nilai-nilai Pancasila), sementara nilai-nilai baru belum didapatkan untuk menjadi pedoman atau norma hidup dalam masyarakat sehingga seringkali muncul pandangan sinis terhadap sistim norma, hilangnya

kewibawaan hukum, disharmoni hubungan antar warga masyarakat.

Nilai Pancasila dapat diklasifikasi menjadi dua, yaitu nilai dasar dan nilai instrumental. Nilai dasar itu sifatnya abstrak dan normatif, isinya belum dapat dioperasionalkan. Agar dapat bersifat operasional dan eksplisit perlu dijabarkan kedalam nilai instrumental. Seperti UUD 1945, Peraturan perundang-undangan. Dengan bersumber lima nilai dasar (Nilai Ketuhanan, Nilai Kemanusiaan, Nilai Persatuan, Nilai Kerakyatan, Nilai Keadilan) tersebut dapat dibuat dan dijabarkan nilai-nilai instrumental penyelenggara negara Indonesia.

Jadi merevitalisasi Pancasila memiliki arti penting, untuk menumbuhkan kesadaran bersama agar Pancasila kembali menjadi dasar negara maupun orientasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila harus dikembalikan dan benar-benar ditempatkan sebagai ideologi negara. Pancasila harus menjwai dan sekaligus diwujudkan dalam produk peraturan perundang-undangan dan realitas sosial. Maka

setiap produk Undang-undang dan peraturan secara substansi tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila harus dibatalkan melalui mekanisme konstitusional.

Revitalisasi Pancasila dapat dimulai dengan kembali menjadikan Pancasila sebagai diskursus. Menurut informasi yang digali dari beberapa narasumber perlu ada upaya serius dari seluruh komponen bangsa ini untuk membuat Pancasila menjadi wacana yang dominan. Hal ini dibutuhkan untuk menandingi perbincangan publik yang banyak dihiasi oleh sikap pragmatisme, hedonisme dan mulai terkikisnya rasa cinta tanah air dan nasionalisme. Dengan menjadi wacana publik, sekaligus dapat dilakukan *reassessment*, penilaian kembali atas pemaknaan Pancasila untuk kemudian menghasilkan pemikiran dan pemaknaan baru. Langkah ini merupakan tahap awal krusial untuk merevitalisasi Pancasila sebagai ideologi terbuka yang dapat dimaknai secara terus menerus sehingga tetap relevan dan fungsional bagi kehidupan bangsa dan negara Indonesia.

Mayoritas informan mengatakan bahwa tanggungjawab moral atas eksistensi Pancasila yang memprihatikan ini adalah terletak pada pemimpin, baik di level nasional, regional, maupun lokal. Pada awal kemerdekaan, dalam rangka kepemimpinan aparatur negara dan pegawai negeri diterapkan kepemimpinan Pancasila, yang memiliki wibawa dan daya yang mampu untuk membawa serta dan memimpin masyarakat lingkungannya kedalam kesadaran, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Adapun prinsip-prinsip utama kepemimpinan Pancasila adalah :

1. Ing Ngarso Sung Tulodo, yang berarti seorang pemimpin harus mampu lewat sikap dan perbuatannya menjadikan dirinya pola anutan dan ikutan orang-orang yang dipimpinnya.
2. Ing Madyo Mangun Karso, seorang pemimpin harus mampu membangkitkan semangat berswakarsa dan berkreasi pada orang-orang yang dibimbingnya.
3. Tut Wuri Handayani, seorang pemimpin mendorong orang-

orang yang diasuhnya agar berani berjalan didepan dan sanggup bertanggung jawab.

Bahkan dalam rangka menghadapi perubahan-perubahan yang begitu cepat dan kompleks kedepan, dibutuhkan bukan sekedar pemimpin, lebih dari itu yaitu meminjam istilah Sayidiman Suryohadiprojo, Negarawan Pancasila : Negarawan yang tidak hanya memandang Pancasila sebagai satu ideal dan falsafah, tetapi disertai tekad untuk menjadikan Pancasila suatu kenyataan hidup di Indonesia. Makna Pancasila yang utama dan perlu segera terwujud adalah kesejahteraan lahir batin yang tinggi dan merata untuk seluruh rakyat Indonesia.

Pemimpin adalah tokoh panutan masyarakat dengan kapasitas dan integritas kepribadiannya ucapan dan tindakannya dapat menjadi teladan bagi masyarakatnya. Bila tokoh pemimpin bangsa telah memiliki komitmen yang kuat untuk menjaga keberadaan Pancasila maka masyarakat akan mengikutinya. Sebaliknya kalau pemimpin tersebut ucapan dan

tindakannya tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila maka dapat membahayakan idiologi negara Pancasila. Harus ada upaya secara serius untuk memikirkan pentingnya Pancasila demi menjaga persatuan dan keberlangsungan negara dan bangsa Indonesia kedepan dalam kemajemukan. Indonesia yang plural dan multikultur ini masih tetap terjaga persatuannya karena segenap komponen bangsa masih memiliki komitmen yang tinggi untuk tetap menjadikan Pancasila sebagai dasar dan idiologi bangsa dan negara Indonesia.

Hingga kini Pancasila tetap diterima sebagai dasar dan idiologi negara. Yudi Latif dalam Janedjri (2012:17) menyatakan, sebagai basis moralitas dan haluan kebangsaan kenegaraan, Pancasila memiliki landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Setiap sila memiliki justifikasi historisitas, rasionalitas, dan aktualitasnya, yang jika dipahami, dihayati, dipercayai, dan diamalkan secara konsisten dapat menopang pencapaian agung peradaban bangsa dan dapat

mendekati terwujudnya “Negara Paripurna”.

Dengan kata lain revitalisasi Pancasila memerlukan keberanian moral para pemimpin bangsa dari berbagai tingkatan. Karena itu harapan untuk menempatkan Pancasila dalam posisi vital juga tergantung inovasi dan kreasi pemimpin dalam aplikasinya. Seperti sosialisasi empat pilar (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika) yang gencar dilakukan oleh anggota MPR RI adalah contoh yang baik bahwa sebagian pemimpin ada yang memiliki kepedulian tentang kesinambungan negara bangsa ini kedepan.

Sosialisasi empat pilar berbangsa dan bernegara ini sangat strategis untuk menempatkan fungsi dan kedudukan Pancasila yang sebenarnya sebagai dasar filsafat bangsa dan negara. Bahkan akhir-akhir ini gereget untuk memperkuat sosialisasi empat pilar kebangsaan ternyata semakin kuat dengan digelarnya dialog Empat Pilar Kebangsaan di kompleks parlemen, Jakarta, Karena itu, beberapa pihak menyarankan dibentuknya lembaga

khusus seperti Badan Pembina Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7) pada masa Orde Baru. "Tapi, desain dan pola sosialisasinya jangan seperti zaman Orba," kata tokoh lintas agama John N. Palinggi dalam Dialog Empat Pilar Kebangsaan di kompleks parlemen, Jakarta.

Dia menjelaskan, beberapa konflik di masyarakat akhir-akhir ini tidak melulu disebabkan faktor agama. Ada yang terjadi karena motif ekonomi hingga perebutan penguasaan kekayaan alam. Semua itu terjadi karena memudarnya pemahaman tentang Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. Perlu lebih serius untuk menanamkan pemahaman empat pilar itu. Kalau tidak dijaga, justru akan menjadi ancaman serius," katanya.

Dialog kemarin juga menghadirkan Ketua MPR Sidarto Danusubroto dan anggota DPR Nurul Arifin. Menurut Sidarto, Indonesia yang terdiri atas beragam suku bangsa dan agama membutuhkan perekat yang kuat. Jika empat pilar kebangsaan itu bisa kembali

ditanamkan pada kehidupan masyarakat, berbagai konflik sosial tidak akan terjadi. "Jika tidak dikelola dengan baik, keberagaman yang ada ini justru bisa mengundang konflik sosial," katanya. (Jawa Pos 29/7/13).

Pancasila dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan dapat dikatakan pernah terjadi penyimpangan. Hal ini dimaksudkan bahwa Pancasila bukan lagi diposisikan sebagai basis dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan melainkan sebagai alat pembenaran suatu kekuasaan. Berbagai penyimpangan yang dilakukan pada masa lalu adalah dengan cara sakralisasi Pancasila dan menjadikan Pancasila sebagai sarana legitimasi politis. Oleh karena itu sosialisasi Pancasila harus dilakukan terus menerus secara berkesinambungan sebagai *way of life*.

Namun sebagian informan juga menganggap bahwa peran serta masyarakat tidak boleh dilupakan. Menggiatkan kembali Pancasila dalam masyarakat merupakan tanggung jawab bersama segenap

komponen bangsa. Selain para pemimpin bangsa dan pemerintah, setiap kepala keluarga dan individu juga memiliki peran yang penting dalam pendidikan nilai-nilai Pancasila. Sebab tanpa andil dari seluruh anak bangsa dalam menjaga Pancasila dan melestarikannya, sulit rasanya Pancasila akan tetap eksis.

Dengan kata lain harus ada sinergi yang baik dalam merevitalisasi Pancasila terutama antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah sebagai penyelenggara negara memiliki peran penting dengan cara mengoperasionalkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap tindakan dan keputusan yang menjadi wewenangnya. Hal ini dengan sendirinya akan berdampak pada kesesuaian antara realitas sosial, tindakan negara, dan peraturan perundang undangan dengan nilai-nilai Pancasila. Selain itu penyelenggara negara juga memiliki kewajiban untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat atas nilai-nilai Pancasila. Harus ada upaya sungguh-sungguh dan sistematis untuk menumbuhkan kesadaran agar nilai-

nilai Pancasila itu dapat menjadi pedoman perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dus, harapan Pancasila kembali menempati posisi sentral dan vital dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menemukan relevansinya.

Cara efektif untuk menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat agar nilai-nilai Pancasila dapat menjadi pedoman perilaku masyarakat dapat melalui berbagai cara dan media. Mayoritas informan menegaskan perlu adanya sosialisasi yang gencar dan terus menerus tentang Pancasila. Prinsipnya dengan sosialisasi yang massif akan berdampak pada persepsi masyarakat yang muaranya adalah dapat mempengaruhi perilaku masyarakat. Intinya masyarakat perlu disuguhi menu Pancasila dalam berbagai ruang kehidupannya agar melekat dalam sanubarinya. Otomatis muncul kesadaran massif di masyarakat bahwa Pancasila adalah pedoman hidupnya sebagai warga negara dan bangsa Indonesia.

Adapun media yang dapat digunakan untuk menggiatkan kembali Pancasila dalam masyarakat

diantaranya melalui televisi, radio, media masa, internet. Menurut mayoritas informan media-media itulah yang paling efektif untuk kembali mempopulerkan Pancasila di tengah-tengah masyarakat. Karena hampir setiap hari masyarakat selalu menyempatkan diri untuk berinteraksi dengan media itu, terutama televisi. Hampir setiap hari sebagian besar masyarakat pasti menonton televisi. Dapat dibayangkan jikalau semua media televisi memiliki komitmen yang sama untuk merevitalisasi Pancasila, tentu akan berimplikasi positif terhadap tumbuh kembangnya penanaman nilai-nilai Pancasila di tengah-tengah masyarakat. Dus, media massa memiliki peran yang besar atas kebutuhan ini. Karena itu komitmen dan kepedulian media massa sangat mempengaruhi keberhasilan sosialisasi Pancasila kepada khalayak.

### **1. Implementasi nilai-nilai Pancasila**

Hasil wawancara berkaitan dengan implementasi nilai-nilai Pancasila mengungkapkan bahwa

sebagian besar informan mengatakan penerapan nilai-nilai Pancasila belum optimal. Sebagian besar informan menyatakan bahwa penerapan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara masih jauh dari harapan. Intinya mereka sependapat bahwa perlu dicarikan jalan keluar (solusi) agar penanaman nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat menjadi optimal.

Berbagai kalangan setuju bahwa belum optimalnya pelaksanaan Pancasila di era reformasi ini tidak lepas dari faktor-faktor adanya kenyataan yang kurang menggembirakan yang membuat Pancasila tetap masih marjinal dalam kehidupan politik, yaitu Pancasila pernah dijadikan rezim Soeharto untuk mempertahankan status quo, liberalisasi politik dengan penghapusan ketentuan tentang Pancasila sebagai satu satunya asas setiap organisasi yang memberi peluang bagi adopsi ideologi-ideologi lain, desentralisasi dan otonomi daerah yang menimbulkan semangat kedaerahan dan sentimen agama. Konsepsi ini sejalan dengan temuan peneliti di lapangan bahwa ada

semacam kekhawatiran masyarakat apabila pola-pola Orde Baru dalam penanaman nilai-nilai Pancasila kembali diterapkan. Sebab model doktriner ala rezim Soeharto tentu berseberangan dengan semangat reformasi yang mengedepankan kebebasan.

Meskipun demikian mayoritas informan menyatakan bahwa Pemerintah merupakan institusi yang memiliki peran utama dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Tanpa intervensi pemerintah implementasi Pancasila akan sulit berkembang. Disamping itu kesadaran dari segenap komponen bangsa, terutama generasi muda sebagai calon pemimpin bangsa juga turut menentukan keberhasilan penerapan nilai-nilai Pancasila ini. Dengan kata lain, simbiosis mutualisme antara pemerintah dan masyarakat dalam mengejawentahkan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlu digencarkan.

Pola-pola sosialisasi massif merupakan model yang baik untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat. Demikian

kesimpulan peneliti dalam menggali informasi dari sebagian besar pendapat informan. Memang masyarakat tidak menghendaki adanya paksaan dalam kegiatan sosialisasi. Melainkan memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat guna menumbuhkan kesadaran. Artinya upaya sosialisasi nilai-nilai Pancasila dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif, tanpa ada paksaan dan doktrinasi dalam pelaksanaannya.

Pendapat lain menyatakan bahwa dunia pendidikan memegang peranan penting dalam mensosialisasikan Pancasila kepada masyarakat. Sosialisasi Pancasila melalui Pendidikan merupakan salah satu jalur dari implementasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan pada dasarnya adalah upaya pembudayaan demi peradaban manusia. Pendidikan Pancasila mutlak harus dilakukan di segala jenjang pendidikan agar manusia Indonesia berbudaya, berkarakter Pancasila. Melalui berbagai kegiatan yang terintegrasi dengan kurikulum

maupun lewat diklat, seminar, dialog dan lain-lain merupakan cara yang tepat sesuai dengan semangat reformasi. Dengan kata lain institusi pendidikan memiliki peran penting dan strategis sebagai forum untuk mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian secara gradual implementasi nilai-nilai Pancasila bisa terus dilakukan melalui dunia pendidikan di berbagai jenjang pendidikan. Al hasil berdampak kepada masyarakat secara keseluruhan sehingga dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu, perilaku yang memancarkan iman dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri dari bermacam-macam agama, perilaku yang bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab, perilaku yang mendukung persatuan bangsa dalam masyarakat yang majemuk, perilaku yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan perseorangan dan golongan sehingga perbedaan pikiran, pendapat maupun kepentingan dapat diatasi dengan musyawarah mufakat. Perilaku yang

mendukung upaya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Upaya memasyarakatkan Pancasila yang dilakukan secara terus menerus sehingga dapat dikenal, dipahami, dihayati, oleh masyarakat yang dapat menumbuhkan kesadaran arti pentingnya Pancasila, tentu dapat dilakukan melalui berbagai cara. Tetapi hasil studi kami menunjukkan bahwa model yang tepat dan relevan dengan situasi dan kondisi saat ini adalah melalui mekanisme sosialisasi.

Sosialisasi adalah upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal dipahami dihayati masyarakat. Melalui sosialisasi Pancasila, ikhtiar memasyarakatkan Pancasila sehingga Pancasila kembali dipahami dan dihayati oleh segenap masyarakat Indonesia. Sosialisasi ini terutama harus melibatkan pemerintah sebagai komponen penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Disisi lain peran aktif dan partisipasi masyarakat secara massif juga memberi andil yang besar dalam kesuksesan pola-pola sosialisasi ini.

Bentuk sosialisasi terstruktur, sistematis dan massif ini akan meraih hasil yang optimal jikalau ditunjang dengan komitmen dan keberpihakan media massa dalam turut serta merevitalisasi dan implementasi nilai-nilai Pancasila

## 1. KESIMPULAN

- 1) Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan berkaitan dengan revitalisasi Pancasila, mayoritas mengatakan bahwa Pancasila sebagai dasar negara wajib untuk direvitalisasi. Argumentasi dominan menyatakan karena Pancasila merupakan pedoman dan pondasi utama dalam menata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- 2) Pola revitalisasi yang konstruktif adalah dengan menggiatkan kembali implementasi nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat. Yang notabene merupakan tanggung jawab bersama segenap komponen bangsa terutama para pemimpin

bangsa, pemerintah dan institusi pendidikan. Disisi lain lingkungan keluarga juga memiliki andil besar dalam konteks pendidikan nilai-nilai Pancasila kepada anggotanya.

- 3) Model implementasi nilai-nilai Pancasila yang paling efektif di tengah-tengah masyarakat adalah dengan cara melakukan sosialisasi. Adapun bentuk sosialisasi yang kontekstual dalam penanaman nilai-nilai Pancasila adalah melalui media massa terutama televisi. Karena itu komitmen dan keberpihakan media massa dalam merevitalisasi dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila memegang peranan yang penting dan menentukan dalam konteks kekinian (spirit reformasi).
- 4) Mekanisme sosialisasi secara terstruktur, sistematis dan massif merupakan model yang baik dan relevan untuk menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila di masyarakat.

Polanya harus mengedepankan kesadaran dan partisipasi masyarakat ketimbang paksaan atau indoktrinasi.

## 2. SARAN

*Bagi pemerintah:*

- Merevitalisasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara mutlak dilakukan demi eksistensi bangsa Indonesia kedepan.
- Bentuk-bentuk kebijakan mengenai revitalisasi harus mengacu pada situasi dan kondisi dewasa ini.

*Bagi masyarakat:*

- Harus turut serta berpartisipasi secara aktif melestarikan Pancasila melalui penerapan nilai-nilainya dalam kehidupan.
- Memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam implementasi nilai-nilai Pancasila agar Pancasila tetap menjadi jati diri dan kepribadian bangsa serta pedoman hidup yang relevan dan kontekstual.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali Muhdi (dkk), 2011, *Merevitalisasi Pendidikan Pancasila*, Surabaya : IAIN Sunal Ampel, Press.
- Ajar Triharso, 2007, *Pendidikan Pancasila Partisipatif (P3)*, Makalah Semiloka Unesa Surabaya.
- Basrowi dan Sukidin, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, Perspektif Mikro, Surabaya, Insan Cendekia
- Dedy Mulyana, 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Rosdakarya.
- Kaelan, 2008, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta, Paradigma.
- Kaelan, 2012, *Problem Epistemologi Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara*, Yogyakarta, paradigma.
- Miles and Huberman, 1996, *Qualitative Data Analysis, A Sourcebook of New Methods*, California, Sage Publication.
- M. Noor Syam, 2007, *Program Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi Dalam Era Reformasi*, Seminar Lokakarya Unesa Surabaya.
- Mulyawan Karim, 2010, *Rindu Pancasila*, Jakarta, Kompas Media Nusantara.
- Rozali Abdullah, 1983, *Pancasila Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa*, Rajawali, Jakarta.
- Slamet Sutrisno, 2013, *Pancasila dan Pluralisme Transendental*, Surabaya, Makalah Seminar Nasional.
- Siswono Yudo Husodo, 2010, *Reaktualisasi Wawasan Kebangsaan Dalam Rangka Meneguhkan NKRI*, Makalah Sarasehan, Malang.
- Syahrial Syarbaini, 2011, *Pendidikan Pancasila*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Winarno, 2012, *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi*, Surakarta, yuma
- Winarno Surakhmad, 2007, *Pendidikan Pancasila Pendekatan Yang Meng-Indonesiakan*, Makalah Seminar dan Lokakarya Pendidikan Pancasila, Unesa Surabaya.
- Yudi Latif, 2011, *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.